

Interpretasi LKPD Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022-2024

Mellya Oka Rahmawati^{1*}, Lisa Kartikasari²

Universitas Islam Sultan Agung¹

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro¹

melliarahmawati@gmail.com¹, lisakartika@unissula.ac.id²

*penulis korespondensi

Keywords: *State and ABSTRACT*

*Local Budget and
Expenditures,
Structure, Scope, and
Performance of
Government*

This study interprets the 2022–2024 post–COVID-19 financial statements of the Bojonegoro Regency Government to improve transparency, accountability, and public understanding. Using a qualitative descriptive case-study approach, data were collected through interviews with financial statement preparers and users, and through analysis of audited reports. Findings show that although the audit opinion is unqualified, key ratios such as fiscal flexibility, operating liquidity, and short-term solvency declined, indicating risks to service continuity and fiscal responsiveness. Financial independence remains low, reflecting strong reliance on central government transfers. Narrative ratio interpretation supports stakeholder theory by emphasizing citizen participation in financial oversight.

Kata Kunci: *Anggaran
dan Belanja Negara
dan Daerah, Struktur,
Ruang Lingkup, dan
Kinerja Pemerintah.*

ABSTRAK

Penelitian ini menginterpretasikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022–2024 pasca pandemi COVID-19 untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman publik. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara penyusun serta pengguna laporan, dan analisis laporan keuangan auditan. Hasil menunjukkan bahwa meski opini audit WTP, beberapa rasio utama seperti fleksibilitas fiskal, likuiditas operasional, dan solvabilitas jangka pendek menurun, mengindikasikan risiko pada kesinambungan layanan dan kapasitas respons fiskal. Kemandirian keuangan masih rendah, mencerminkan ketergantungan pada transfer pusat. Narasi rasio sejalan dengan teori pemangku kepentingan

How to cite: Rahmawati *et al* (2025). Interpretasi LKPD Kabupaten Bojonegoro Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Analisis Kondisi Keuangan Tahun 2022-2024. Jurnal Acitya Ardana, 5 (2), 143-154.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri. Otonomi daerah merupakan hak serta wewenang yang dimiliki oleh suatu daerah guna mengatur dan mengelola kepentingan pemerintahan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini bersumber dari mandat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami amendemen pada tahun 2000, dan selanjutnya diatur lebih lanjut melalui regulasi khusus mengenai pemerintahan daerah (Kurniawan, 2012 dalam Christia & Ispriyarso, 2019).

Dalam konteks desentralisasi fiskal, otonomi daerah secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendorong kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iskandar, 2021; Agustina, 2013 dalam Iskandar, 2021). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian daerah dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

Menjelang akhir tahun 2022, penyebaran COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan awal pandemi pada Maret 2020. Kementerian Kesehatan mencatat total kasus terkonfirmasi sebanyak 6.719.815 orang, dengan 6.549.332 orang dinyatakan sembuh dan 160.612 meninggal dunia. Positivity rate harian mencapai 2,78% dan mingguan (periode 25–31 Desember 2022) sebesar 2,68%, tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam menetapkan prioritas anggaran, melakukan penyesuaian, serta mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi, dengan tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam aspek pengelolaan maupun pelaporan keuangan.

Transparansi dimaknai sebagai penyediaan informasi dan pengungkapan yang memadai kepada publik melalui laporan keuangan pemerintah. Transparansi diperlukan agar publik dapat menjalankan hak atas informasi, hak untuk mengetahui, dan menyampaikan aspirasi. Dalam kerangka akuntansi pemerintahan, transparansi mengacu pada penyajian informasi keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Tarigan & Nurtanzila, 2013).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, proses akuntansi meliputi tahapan identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, peringkasan, penyajian, hingga interpretasi atas transaksi keuangan. Seluruh hasil dari proses tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LKPD berfungsi sebagai instrumen utama yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah melaksanakan anggaran. Tingkat akuntabilitas pemerintah dapat dievaluasi melalui analisis laporan keuangan, yang berguna untuk menilai kondisi keuangan saat ini dan memperkirakan prospek keuangan di masa mendatang.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2021), literasi keuangan diartikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang secara bersama-sama membentuk sikap serta perilaku individu dalam membuat keputusan dan mengelola keuangan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih berada pada angka 49,68%. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan menunjukkan capaian yang lebih tinggi, yakni sebesar 85,10%. Fakta ini mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kapasitas memadai untuk memahami informasi keuangan, termasuk dalam konteks pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, total pendapatan setelah perubahan tercatat sebesar Rp5,45 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp8,07 triliun. Kesenjangan antara pendapatan dan belanja ditutupi oleh pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp2,61 triliun. Kondisi keuangan daerah mengalami surplus seiring meningkatnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada September 2020, Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah penduduk 1.301.635 jiwa.

SILPA idealnya dimanfaatkan untuk menutupi defisit, mendukung pembangunan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2023, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro meningkat dari 71,15 menjadi 71,8, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur (74,65) dan menempatkan Bojonegoro di peringkat 27 dari 38 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran, termasuk penggunaan SILPA, belum sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut hingga tahun 2023. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) mencapai 91,18% hingga Semester II 2023. Meskipun demikian, Ritonga, (2014) menegaskan bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sesungguhnya. Menurut Febriyanto & Adi (2016) dalam Rastika, (2022), Analisis rasio keuangan berperan sebagai instrumen yang menghubungkan antara proses pengelolaan dan hasil kinerja perusahaan dengan pemiliknya, yang dilaporkan secara berkala dalam periode tertentu. Selain itu, analisis ini juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan baru. Hal ini tentunya juga berlaku bagi pemerintah daerah selaku pengelola APBD yang bertanggungjawab kepada rakyat selaku *stakeholder*. Namun dalam hal ini, Putri, (2023) menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi keuangan secara mendalam.

Dengan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian mengenai interpretasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penafsiran yang lebih bermakna terhadap laporan keuangan agar dapat dipahami oleh seluruh pemangku

kepentingan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana memberikan interpretasi atau pemaknaan atas Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Daerah kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan analisis dan membandingkannya dengan tinjauan literatur.

Penelitian ini menggunakan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 hingga 2024 serta hasil wawancara dengan narasumber terkait interpretasi laporan keuangan. Wawancara dilakukan dengan 2 orang Tim Penyusun Laporan Keuangan dan 2 orang Pengguna Laporan Keuangan. Analisis dilakukan melalui perhitungan 5 jenis rasio keuangan terhadap laporan keuangan tahun 2022 hingga 2024. Wawancara digunakan untuk mengevaluasi pentingnya interpretasi laporan keuangan daerah dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil wawancara juga dianalisis untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna laporan keuangan serta pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, analisis ini bertujuan memberikan rekomendasi terhadap aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam penyusunan dan interpretasi laporan keuangan daerah. Kesimpulan akhir penelitian difokuskan pada pemberian interpretasi yang mampu meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Interpretasi Laporan Keuangan dari Sudut Pandang Penyusun dan Pengguna

Berdasarkan hasil kajian terhadap persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan daerah, diperoleh sejumlah temuan yang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dan kebutuhan informasi keuangan di antara keduanya. Pertama, dari sisi pengetahuan mengenai proses penyusunan laporan keuangan daerah, penyusun, khususnya yang berasal dari BPKAD atau instansi teknis, memahami secara menyeluruh proses tersebut, mulai dari pengumpulan data keuangan dari seluruh perangkat daerah, verifikasi, konsolidasi, hingga penyusunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, sebagian besar pengguna, seperti DPRD dan masyarakat umum, hanya mengetahui bahwa laporan disusun dan diaudit, namun tidak memahami proses teknis yang mendasarinya.

Kedua, mengenai penilaian terhadap kewajiban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusun menilai bahwa pemerintah daerah telah berupaya memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, yang dibuktikan dengan peningkatan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Namun, pengguna memiliki pandangan yang lebih kritis, terutama terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Ketiga, terdapat pemahaman yang selaras bahwa penyusunan laporan keuangan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, yaitu SAP, serta peraturan lainnya seperti PP No. 71 Tahun 2010 dan regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, standar tersebut cenderung lebih dipahami oleh penyusun, sementara pengguna laporan umumnya hanya fokus pada isi dan hasil akhir tanpa memperhatikan dasar penyusunannya.

Keempat, dalam hal pemahaman terhadap isi laporan keuangan tanpa interpretasi, penyusun dapat memahami informasi tersebut dengan baik karena kesehariannya berkaitan langsung dengan sistem pelaporan. Sebaliknya, pengguna, terutama dari kalangan non-akuntansi, sering kali kesulitan memahami tabel, neraca, dan laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam format teknis.

Kelima, baik penyusun maupun pengguna sepakat bahwa perlu adanya ringkasan eksekutif yang menjelaskan kondisi keuangan pemerintah daerah secara ringkas dan mudah dipahami. Ringkasan ini dinilai penting untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan transparansi, khususnya kepada publik yang tidak memiliki latar belakang akuntansi.

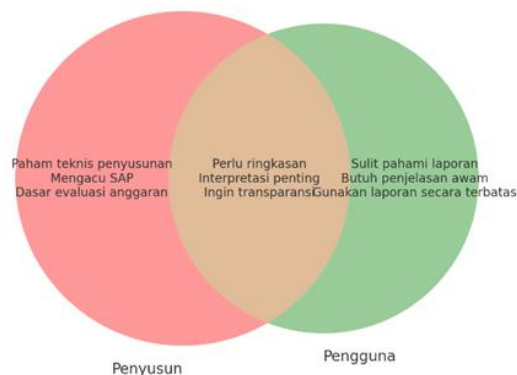
Keenam, interpretasi laporan keuangan dalam bentuk ringkasan dipandang sangat penting untuk dibuat karena dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antara penyusun dan pengguna. Ringkasan yang bersifat naratif dan visual dapat membantu pengguna memahami substansi laporan keuangan tanpa harus menelaah seluruh dokumen yang bersifat teknis.

Ketujuh, dalam konteks analisis rasio keuangan sebagai alat interpretasi, terdapat perbedaan pandangan terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap hasil analisis tersebut. Penyusun menilai bahwa rasio keuangan cukup informatif jika disajikan secara sederhana, sementara pengguna merasa bahwa istilah dan konsep rasio masih sulit dipahami oleh masyarakat awam tanpa adanya penjelasan tambahan.

Terakhir, baik penyusun maupun pengguna menyatakan bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau opini, meskipun pengguna, terutama masyarakat umum, cenderung menggunakan laporan tersebut secara terbatas dan hanya untuk menarik kesimpulan umum. Sebaliknya, pihak legislatif dan pengawas anggaran menggunakan laporan ini secara lebih aktif dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi program.

Gambar 1. Diagram Venn Persepsi Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Diagram Venn: Persepsi Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan Daerah



Sumber: Wawancara diolah, 2025

Berikut adalah diagram Venn yang menggambarkan persamaan dan perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan daerah. Diagram ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman teknis, kedua pihak sepakat mengenai pentingnya ringkasan interpretatif dan transparansi informasi.

Analisis Rasio Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Rasio Operasi dan Komitmen Layanan

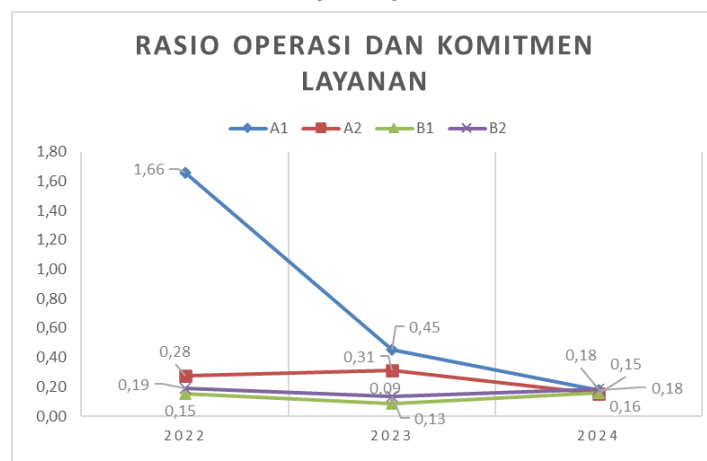
Berdasarkan hasil penghitungan, pada tahun 2022-2023 penurunan signifikan nilai perubahan rasio operasi ($\Delta A1$) sebesar -1,2 dan $\Delta A2$ sebesar 0,03 serta nilai perubahan rasio komitmen layanan $\Delta B1$ sebesar -0,07 dan $\Delta B2$ -0,06. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan operasional pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkriteria sangat buruk. Akan tetapi, pada tahun 2023-2024, meski terdapat penurunan ($\Delta A1$) sebesar -0,28 dan $\Delta A2$ sebesar -0,16, terdapat kenaikan $\Delta B1$ sebesar 0,07 dan $\Delta B2$ 0,05, maka kondisi kemampuan beroperasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah kurang baik.

Tabel 1. Tabel Rasio Operasi dan Komitmen Layanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024	Δ 2022-2023	Δ 2022-2024
A1	1,66	0,45	0,18	-1,20	-0,28
A2	0,28	0,31	0,15	0,03	-0,16
B1	0,15	0,09	0,16	-0,07	0,07
B2	0,19	0,13	0,18	-0,06	0,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Gambar 2. Grafik Rasio Operasi dan Komitmen Layanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Meskipun sempat turun signifikan di tahun 2023, rasio operasional dan komitmen layanan mengalami peningkatan di tahun 2024, naiknya beban/belanja pemeliharaan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Bojonegoro masih berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya agar mampu meningkatkan dan menjaga kualitas layanan walaupun terjadi penurunan pendapatan maupun efisiensi beban.

2. Rasio Kelenturan Keuangan

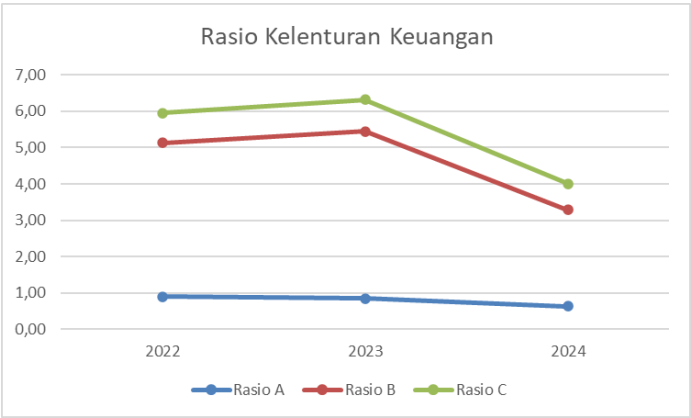
Berdasarkan hasil penghitungan, rasio A, B, dan C mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 ke 2023, akan tetapi mengalami penurunan signifikan di ketiganya pada tahun 2024.

Tabel 2. Tabel Rasio Kelenturan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Rasio A	0,89	0,84	0,62
Rasio B	4,24	4,60	2,67
Rasio C	0,83	0,88	0,72

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Gambar 4. Grafik Rasio Kelenturan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Nilai Rasio Kelenturan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro cenderung kurang baik meskipun memiliki nilai positif dari pembilang (Pendapatan Operasional – Belanja Wajib) yang menunjukkan sumber daya bebas (*free resources*) yang tersedia untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi dana yang tersedia untuk belanja tidak wajib dan pembangunan mulai menyusut. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan pendapatan operasional untuk menghindari rigiditas anggaran yang tinggi di masa depan.

3. Rasio Likuiditas Operasional

Semakin tinggi rasio likuiditas operasional, maka semakin besar pula kemampuan suatu entitas dalam menjalankan aktivitas operasionalnya tanpa harus mengurangi cakupan maupun mutu pelayanan publik yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil pengukuran rasio ini juga mencerminkan ketersediaan kas yang memadai untuk menutup seluruh kewajiban belanja wajib pemerintah daerah.

Tabel 3. Tabel Rasio Likuiditas Operasional Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
<i>Rasio Likuiditas Operasional</i>	2,86	2,50	1,32

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Gambar 5. Grafik Rasio Likuiditas Operasional Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Penurunan rasio dari 2,86 menjadi 1,32 mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih likuid dan masih mampu menutupi belanja wajib, kapasitas fiskalnya untuk menghadapi kejadian tak terduga atau membiayai program baru semakin terbatas. Jika tren ini terus berlanjut, maka pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan pengelolaan kas dan memperkuat strategi optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja.

3. Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

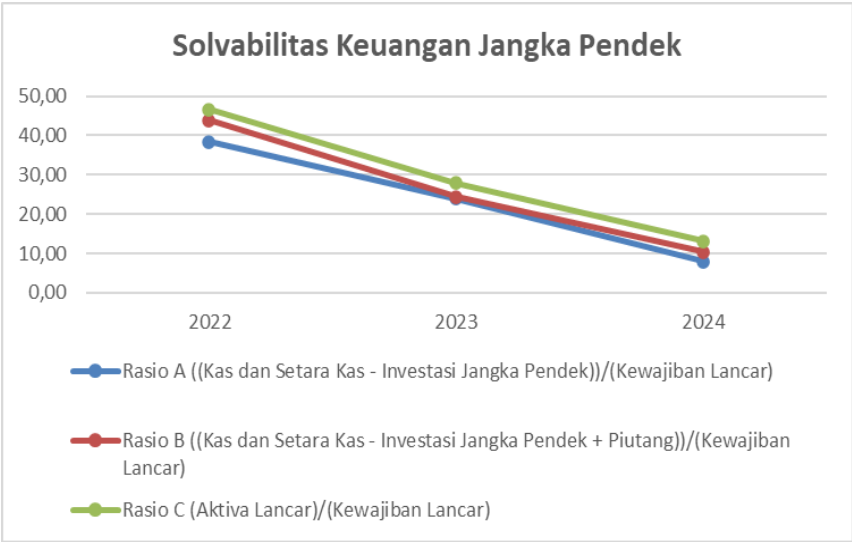
Terdapat tren penurunan tajam di ketiga jenis rasio dalam periode tiga tahun terakhir. Rasio A turun dari 38,34 (2022) ke 8,01 (2024), mencerminkan penurunan signifikan dalam ketersediaan kas bersih untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Rasio B, yang memperhitungkan piutang, juga menurun dari 43,84 menjadi 10,34, menunjukkan bahwa meskipun piutang tersedia, jumlah total aset likuid masih belum cukup ideal dibandingkan kewajiban yang ada. Rasio C sebagai indikator umum likuiditas menurun dari 46,63 ke 13,16, menandakan menurunnya kapasitas fiskal daerah dalam menjamin kelancaran pembayaran kewajiban jangka pendek secara menyeluruh.

Tabel 4. Tabel Rasio Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
<i>Rasio A</i>	38,34	23,94	8,01
<i>Rasio B</i>	43,84	24,37	10,34
<i>Rasio C</i>	46,63	27,91	13,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Gambar 6. Grafik Rasio Kelenturan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Penurunan yang konsisten di ketiga rasio tersebut mengindikasikan melemahnya posisi keuangan jangka pendek pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan potensi risiko fiskal yang perlu segera ditangani, terutama dalam menjamin kelancaran pembayaran kewajiban rutin. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi pengelolaan kas, pengendalian investasi jangka pendek, serta efektivitas pengumpulan piutang agar kapasitas likuiditas dan solvabilitas tetap terjaga secara optimal.

4. Rasio Kemandirian Keuangan

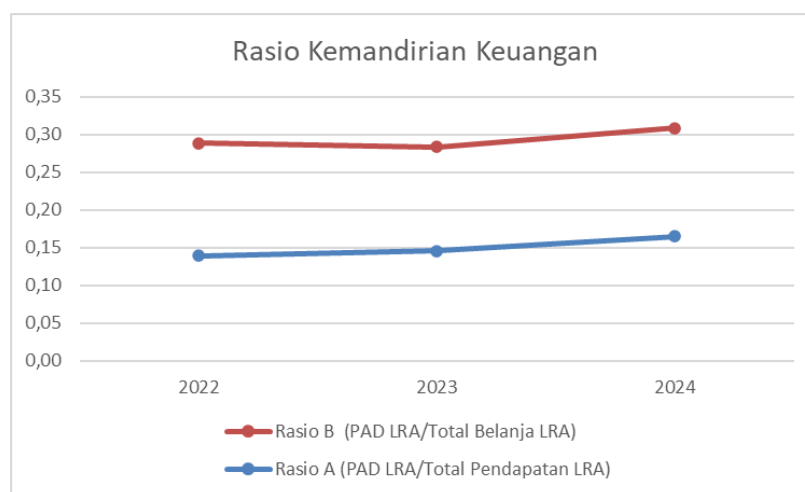
Berdasarkan data Kabupaten Bojonegoro, Rasio A (PAD terhadap total pendapatan LRA) menunjukkan tren peningkatan yang moderat dari 0,14 pada tahun 2022 menjadi 0,16 pada tahun 2024. Sementara itu, Rasio B (PAD terhadap total belanja LRA) justru mengalami sedikit penurunan, dari 0,15 pada tahun 2022 menjadi stabil di angka 0,14 pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 5. Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
<i>Rasio A</i>	0,14	0,15	0,16
<i>Rasio B</i>	0,15	0,14	0,14

Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Gambar 7. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Bojonegoro, 2025

Peningkatan ini Rasio A mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah mengalami perbaikan, meskipun masih berada pada level yang cukup rendah. Dengan kata lain, sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer antar pemerintah. Pada Rasio B, peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan, belum cukup signifikan untuk mendukung keseluruhan belanja daerah secara mandiri.

Secara umum, kedua rasio mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro masih relatif rendah, yang artinya pemerintah daerah masih sangat tergantung pada sumber pendanaan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan potensi PAD yang lebih optimal, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) dan aset daerah yang produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, F.C. (2022, 2023) dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun, tanpa melakukan wawancara terhadap penyusun maupun pengguna laporan keuangan. Penelitian ini terbatas pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Belum ada regulasi dari pemerintah pusat terkait kewajiban interpretasi laporan keuangan menggunakan analisis rasio.

Transparansi dan interpretasi laporan keuangan daerah yang baik merupakan prasyarat utama dalam mendukung pengambilan keputusan publik yang efektif dan akuntabel. Hasil kajian menunjukkan terdapat kesenjangan pemahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan, serta penurunan kinerja keuangan daerah pada berbagai rasio utama seperti likuiditas, solvabilitas, dan kelenturan fiskal. Meskipun penyusun memahami teknis penyusunan sesuai standar akuntansi, pengguna terutama masyarakat umum dan sebagian legislatif kesulitan dalam menafsirkan laporan tanpa penjelasan naratif. Hal ini diperparah dengan rendahnya kemandirian fiskal dan potensi tekanan kas jangka pendek yang meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap lima kelompok rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ditemukan beberapa temuan penting terkait kondisi fiskal daerah. Pertama, rasio operasi dan komitmen layanan menunjukkan penurunan pada periode 2022–2024, yang mencerminkan efisiensi belanja operasional namun perlu dikaji dampaknya terhadap kualitas layanan publik. Kedua, tren penurunan rasio kelenturan keuangan mengindikasikan menyempitnya ruang fiskal, yang dapat menghambat respons terhadap kebutuhan strategis dan mendesak. Ketiga, rasio likuiditas operasional turun drastis dari 2,86 (2022) menjadi 1,32 (2024), mencerminkan melemahnya kemampuan kas dalam membiayai belanja wajib dan meningkatnya potensi tekanan likuiditas. Keempat, rasio solvabilitas jangka pendek juga menurun, baik dari sisi aset lancar maupun kas bersih terhadap kewajiban lancar, yang menunjukkan peningkatan risiko keuangan jangka pendek. Kelima, rasio kemandirian keuangan masih rendah, dengan dominasi pendanaan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, meskipun terdapat sedikit peningkatan PAD pada 2024. Secara keseluruhan, hasil analisis menekankan pentingnya evaluasi keuangan daerah tidak hanya dari aspek regulatif, tetapi juga dari kapasitas fiskal, efisiensi, dan keberlanjutan. Pendekatan rasio keuangan dengan narasi yang informatif sejalan dengan teori stakeholder, dan berperan penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Interpretasi laporan keuangan yang naratif dan mudah dipahami sangat penting untuk menjembatani kesenjangan informasi, meningkatkan transparansi fiskal, serta memperkuat kualitas pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah. Lebih lanjut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri agar memperkuat komunikasi fiskal kepada publik dengan mengatur regulasi terkait interpretasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan rasio keuangan, sehingga pemerintah daerah dapat melampirkan interpretasi tersebut di bagian depan laporan keuangannya sebagai upaya peningkatan keterpahaman, transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83-93.

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro (2025). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024.
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2020). Hasil Sensus Penduduk September 2020. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro*.
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2023. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro*.
- Buchori, W. P. M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Chintya, K. D., & Maria, E. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 586-601. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7274>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 5(1), 11-24.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). Public Governance Dan Korupsi: Bukti Pengujian Dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 223-234. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.3.223-234>
- Pemerintah Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 11(2), 410-415.
- Putri, F. C. (2023). Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomika*, 14(1), 145-158.
- Rastika, D. M. (2022). Analisis Rasio Keuangan dan Prediksi Kebangkrutan dengan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Semen Tahun 2016-2019. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 2(2), 122-130. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1349>
- Ratna, R., Manurung, J. S., Darmawati, D., Napitupulu, T. T., & Syahdewa, B. I. (2023). Peranan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 25-33. e-ISSN: 2986-3716
- Ritonga, I. T. (2014). *Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition*. *Journal of Indonesian Economy & Business*, 29(2).
- Ritonga, I. T. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pemda: Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29-45.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Suryati, E. (2019). Faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 179-188.